

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah di SD Kanisius Kadirojo

Kebijakan mutu sekolah yang diselenggarakan di SD Kanisius Kadirojo ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah. Perumusan kebijakan mutu sekolah tersebut melibatkan partisipasi kepala sekolah, guru, komite sekolah, komite kelas (orang tua), dan masyarakat di setiap tahap perumusan kebijakan. Proses kebijakan mutu sekolah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi masalah (*problem formulation*), formulasi kebijakan (*formulation*), penentuan kebijakan (*adoption*), dan implementasi kebijakan (*implementation*).

Pada tahap pertama yaitu formulasi masalah belum nampak adanya partisipasi dari stakeholder sekolah maupun masyarakat, hal ini dikarenakan pada tahap ini merupakan tahap dimana suatu gejala disadari sebagai sebuah masalah yang membutuhkan solusi. Selanjutnya pada tahap formulasi kebijakan sudah terdapat partisipasi dari stakeholder sekolah, akan tetapi belum melibatkan warga masyarakat, orang tua maupun komite sekolah hal ini dimaksudkan agar stakeholder sekolah dapat memantapkan gambaran mengenai kebijakan mutu sekolah yang berorientasi lingkungan hidup. Selanjutnya pada tahap penentuan kebijakan, partisipasi baik dari stakeholder sekolah maupun komite

sekolah dan masyarakat sudah terjadi lebih baik dari tahap formulasi kebijakan. Partisipasi yang terjadi dapat dilihat dalam beberapa langkah yang digunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan terakhir, partisipasi dapat dilihat pada tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini partisipasi yang terjadi lebih mendominasi dari tahap-tahap proses kebijakan yang sebelumnya. Seluruh kegiatan sekolah dan program yang dibuat oleh sekolah senantiasa melibatkan komite sekolah, komite kelas maupun masyarakat. Hal ini disadari oleh stakeholder sekolah bahwa keberlangsungan sekolah dan program-program sekolah tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dan partisipasi baik dari komite kelas, komite sekolah maupun masyarakat.

2. Faktor yang Mendukung Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah

Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan mutu sekolah ini diantaranya adalah kesadaran warga sekolah bahwa sekolah berada di lingkungan masyarakat sehingga keberlangsungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat; masyarakat juga memperoleh manfaat dari adanya kebijakan tersebut; letak sekolah yang tenang dan aman; letak sekolah yang tidak terlalu sulit untuk dijangkau kendaraan; alumni yang sudah berhasil.

3. Hambatan yang Dihadapi Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah

Selain faktor pendukung terdapat pula faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan mutu sekolah, yaitu diantaranya adalah partisipasi aktif dari orang tua lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu daripada bapak-bapak; masih kurangnya biaya untuk pendidikan maupun untuk kegiatan; masih kurangnya lahan untuk perluasan gedung; masih terdapat beberapa peserta didik dan guru yang belum disiplin dalam membuang sampah; pedagang yang parkir sembarangan.

4. Solusi yang Dilakukan untuk Mengatasi Masalah yang Muncul

Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu adanya kendala keuangan diatasi dengan memperluas jaringan atau membangun mitra sekolah lebih luas lagi juga adanya partisipasi aktif dalam bentuk biaya dari orang tua; masalah sempitnya lahan untuk sementara hanya bisa disiasati oleh masing-masing guru kelas dalam mengajar karena belum ada kemungkinan untuk memperluas bangunan; ketidakdisiplinan warga sekolah dalam membuang sampah, diatasi dengan memberikan lagu wajib “taruh sampah” kepada peserta didik setiap hari Senin agar menjadi karakter bagi peserta didik maupun guru untuk membuang sampah di tempatnya sesuai jenis sampah, serta tidak bosan-bosannya memberi peringatan untuk setiap ketidakdisiplinan yang terjadi.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di sekolah dilakukan evaluasi terhadap jalannya kegiatan maupun jalannya suatu kebijakan dari sekolah.
2. Perlu adanya dokumen/notulen yang jelas untuk semua hal yang terjadi di sekolah.
3. Perlu adanya pelatihan kepemimpinan atau pengkaderan pemimpin untuk setiap guru sehingga ketika terjadi pergantian pemimpin, mutu sekolah akan tetap terjaga.
4. Sebaiknya adanya partisipasi dari masyarakat dilakukan di setiap tahap proses kebijakan di sekolah, sehingga akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta. Suara Bebas
- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Ali Imron. (1995). *Kebijaksaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depannya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Anonim. (2010). *Program Peningkatan Mutu Sekolah*. Diambil dari <http://edukasi.kompasiana.com/2010/10/10/program-peningkatan-mutu-sekolah/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2011.
- Arcaro, Jerome S. (2005). Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan. Hak cipta oleh St. Lucie Press, 1995. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif Rohman. (2001). *Kebijakan Pendidikan*. Diktat Dosen, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama.
- Aswasulasikin. (2009). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Perigi Kecamatan Suela Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*. Tesis Magister, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Putra Grafika.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI Nomor 20, tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional.
- _____. (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep Dan Pelaksanaan*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
- Dzaujak Ahmad. (1996). Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar. Jakarta: Depdikbud
- Edward Sallis. (2010). *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Yogyakarta : Ircisod.

- Fasli Djajal & Dedi Supriadi (eds). (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Holil Soelaiman. (1980). *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Howard Gardner. (2003). Kecerdasan Majemuk : Teori dalam Praktek. Alih bahasa : Arvin Saputra. Batam : Interaksara.
- Ibrahim Bafadal. (2003). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Depdiknas.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Marzal. (2008). *Partisipasi Orang tua Siswa dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Yogyakarta*. Tesis Magister, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles M.B & Huberman A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muhammad Munadi. (2008). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan di Kota Surakarta*. Tesis Magister, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mulyasa. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Riyanto. (2007). *Peran Komite Sekolah di SD Negeri Karanglo Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*. Tesis Magister, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Roida Ekayani Napitupulu. (2011). *Menjadi Tua dan Produktif, Studi Pada Lanjut Usia Produktif di Yogyakarta*. Metode Penelitian Skripsi, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

- Saca Firmansyah. 2009. *Partisipasi Masyarakat*. Diambil pada 20 Mei 2011 dari <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>.
- Siti Irine Astuti Dwi Ningrum. (2009). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta : FIP UNY.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudarwan Danim. (2003). *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Buku Ajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumampouw, Monique. (2004). *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jacub Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta
- S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Cetakan III, Bandung: PT. Tarsito.
- Umaedi. (1999). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Diambil dari <http://www.ssep.net/director.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2011.
- Umiarso & Imam Gojali. (2010). *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta : Ircisod.
- William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Y. B. Mangunwijaya. (2003). *Impian dari Yogyakarta*. Jakarta : Kompas.